

Nomor : 30871/D.2.1/11/2023 06 November 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Jawaban atas Klarifikasi Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2023 untuk Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Yth. **Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah**
(sesuai daftar terlampir)

Menindaklanjuti Surat Klarifikasi Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2023 untuk Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan yang Saudara/i sampaikan, kami memberikan apresiasi atas klarifikasi yang telah disampaikan. Menjawab klarifikasi Saudara/i tersebut, berikut beberapa hal yang perlu kami sampaikan:

1. Formula penilaian ITKP Tahun 2023 mengacu kepada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan ITKP Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi.
2. Jawaban terhadap Klarifikasi Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2023 untuk Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan kami sediakan pada tautan: <https://bit.ly/publikasitanggapanklarifikasiITKP2023>. Bilamana klarifikasi yang Saudara/i sampaikan disetujui maka sudah dilakukan pembaruan pada Hasil Penilaian ITKP Tahun 2023 untuk Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan.
3. Dengan memperhatikan Surat Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Nomor: 28124/D.3/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan tentang Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Sementara Tahun 2023 untuk indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dan Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ, bahwa batas waktu penyampaian bukti dukung Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dan Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ kepada Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP paling lambat diterima pada tanggal 29 Oktober 2023, maka kami tidak membuka masa klarifikasi untuk kedua indikator tersebut mengingat keterbatasan waktu penyampaian hasil penilaian final ITKP 2023 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Selanjutnya untuk hasil penilaian final ITKP Tahun 2023 akan segera disampaikan kepada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebelum batas akhir penyampaian yaitu tanggal 15 November 2023.
5. Hasil Penilaian Final ITKP Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada dashboard ITKP yang dapat diakses melalui menu dashboard pada website <https://sirup.lkpp.go.id/>.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Saudara/i kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Perencanaan Transformasi,
Pemantauan, dan Evaluasi
Pengadaan,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : mg02aB
Nomor Tiket : SK202311060010



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Fadli Arif

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga terkait
2. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait
3. Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP
4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

Token : mg02aB

Nomor Tiket : SK202311060010

No	Nama Instansi
1	Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2	Kota Denpasar
3	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
4	Kabupaten Bungo
5	Kabupaten Lampung Utara
6	Ombudsman RI
7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8	Kabupaten Lebak
9	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
10	Kementerian Pertanian
11	Kota Bogor
12	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
13	Kota Blitar
14	Kabupaten Tuban
15	Komisi Pemberantasan Korupsi
16	Kabupaten Minahasa Utara
17	Kabupaten Way Kanan
18	Kabupaten Bekasi
19	Kabupaten Ogan Ilir
20	Kota Surabaya
21	Kota Singkawang
22	Kabupaten Dharmasraya
23	Kabupaten Buton Selatan
24	Kabupaten sukabumi
25	Provinsi Sulawesi Tengah
26	Provinsi Nusa Tenggara Barat
27	Kota Depok
28	Provinsi Kepulauan Riau
29	Kota Surakarta
30	Kabupaten Jombang
31	Kabupaten Malang
32	Daerah Istimewa Yogyakarta
33	Kabupaten Bojonegoro
34	Kabupaten Kepulauan Mentawai
35	Kementerian Sosial
36	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
37	Kabupaten Musi Rawas Utara
38	Kabupaten Kapuas
39	Kabupaten Humbang Hasundutan
40	Kabupaten Klungkung
41	Mahkamah Konstitusi
42	Kabupaten Lombok Utara
43	Kabupaten Pinrang
44	Kementerian Koperasi dan UKM
45	Kabupaten Kudus

46	Kabupaten Padang Lawas
47	Kementerian Kesehatan
48	Kabupaten Madiun
49	Kabupaten Pacitan
50	Provinsi Aceh
51	Badan Riset dan Inovasi Nasional
52	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
53	Kabupaten Serang
54	Kabupaten Tabanan
55	Kota Palembang
56	Badan Intelijen Negara
57	Kabupaten Ogan Komering Ulu
58	Kabupaten Penajam Paser Utara
59	Kementerian Dalam Negeri
60	Kabupaten Sambas
61	Kota Padang
62	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi